

ANTARA NEWS BALI

Mencerahkan, Memberdayakan, Mengedukasi, Nasionalisme

**BALI-MALAYSIA JAJAKI KERJA SAMA
BIDANG PENDIDIKAN**

Hal. 2



**BADUNG BENTUK TIM KHUSUS TERTIBKAN
"PEMANGKU" PARIWISATA**

Hal. 7



DTIK FESTIVAL

**SAJIKAN INOVASI DIGITAL KREATIF
BERBASIS BUDAYA**

06

Bali-Malaysia Jajaki Kerja Sama Bidang Pendidikan

Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Malaysia tertarik untuk mengembangkan kerja sama bidang pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa dari kedua belah pihak.

“Kami menyambut baik rencana pertukaran pelajar, ini adalah langkah yang cukup efektif untuk menambah wawasan para siswa,” kata Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati saat menerima kunjungan Menteri Penasihat (Pendidikan) Kedutaan Besar Malaysia Dr Mior Harris Bin Mior Harum di Denpasar, Senin.

Menurut Wagub Bali yang akrab dipanggil Cok Ace, saat ini sudah banyak pertukaran pelajar yang telah dilakukan, seperti SMAN 1 Ubud, Kabupaten Gianyar yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang.

Siswa-siswi SMA di Ubud banyak yang mendapatkan kesempatan belajar di Jepang selama kurun waktu 1-3 bulan. “Mereka tinggal di rumah-

rumah warga sambil belajar kebudayaan Jepang juga. Begitu juga sebaliknya banyak siswa Jepang yang belajar ke Ubud,” ujarnya.

Mengenai teknis pertukaran pelajar yang ditawarkan Pemerintah Malaysia, dia menyerahkan dengan instansi terkait. “Yang pasti saya sangat mengapresiasi langkah awal ini. Semoga ke depan kita bisa mengembangkan kerja sama ini, serta semakin banyak anak-anak muda di Malaysia yang tertarik untuk belajar ke Bali,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Penasihat (Pendidikan) Kedutaan Besar Malaysia Dr Mior Harris Bin Mior Harum mengatakan pihaknya ingi membangun kolaborasi yang lebih bermakna di bidang pendidikan dengan Pemprov Bali terhadap siswa-siswi di Bali.

“Saya ingin mengundang beberapa siswa melanjutkan ke universitas-universitas terbaik yang ada di Malaysia, supaya



Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) berfoto bersama dengan rombongan Menteri Penasihat (Pendidikan) Kedutaan Besar Malaysia Dr Mior Harris Bin Mior Harum (AntaraneWS Bali via Humas Pemprov Bali)

bisa ikut merasakan belajar di sana. Jika ini berhasil saya ingin ke depan ada kerja sama yang berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini sudah ada beberapa Universitas di Malaysia yang sudah masuk 100 besar perguruan tinggi terbaik dunia, sehingga dia berpendapat siswa-siswa di Indonesia khususnya Bali tidak usah jauh-jauh untuk belajar dan mencari universitas terbaik di dunia. “Malaysia sudah bisa menjadi rujukan

universitas yang bagus, dan saya harap ke depan banyak anak-anak kita yang bersedia melakukan pertukaran pelajar,” ucap Mior.

Untuk langkah awal, ia merencanakan akan mengundang 20 siswa SMA/SMK belajar di negaranya. “Mungkin awalnya kami akan ajak di sekitar Pinang dan Lagawi terlebih dahulu, sambil berharap berikutnya akan ada kerja sama lebih dalam,” katanya. (ant)

Pemprov Bali Segera Rapatkan Isu Wisata Murah



Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) usai menghadiri sidang paripurna DPRD Bali, di Denpasar (AntaraneWS Bali/Ni Luh Rhisma)

Jajaran eksekutif dan legislatif Provinsi Bali segera menggelar rapat koordinasi dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait menanggapi dugaan pariwisata setempat yang dijual murah di Negeri Tirai Bambu.

“Tadi sudah sepakat kami

dengan Dewan, kebetulan Komisi II yang menangani sedang di luar, segera mudah-mudahan tidak lebih tanggal 30 ini akan berkoordinasi apa langkah selanjutnya,” kata Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Bali, di Denpasar, Senin.

Cok Ace saat “blusukan” ke sejumlah toko yang diduga milik investor dari Tiongkok di kawasan Benoa, Denpasar, dan ditengarai menjadi tempat wisatawan dari Tiongkok yang “dipaksa” berbelanja saat berwisata ke Bali, belum lama ini telah melihat secara langsung ada tenaga kerja asing yang dipekerjakan di sana.

“Walaupun dibantah tidak ada tenaga asing, tetapi

kami melihat sendiri ada tenaga asing di sana. Produk yang dijual dari China juga memang begitu adanya. Jadi, sekarang selanjutnya langkah kami adalah berkoordinasi yang menyangkut ketenagakerjaan, masalah izin-izin barang yang dijual dan sebagainya,” ucapnya yang juga Ketua PHRI Bali itu.

Cok Ace mempertanyakan, mengapa mereka di Bali menjual produk-produk China dan juga ditawarkan kembali kepada wisatawan dari Negeri Tirai Bambu, padahal seharusnya dapat mengutamakan menjual produk lokal Bali.

Di sisi lain, tokoh Puri Ubud itu tidak memungkiri masih adanya kasus paket wisata murah karena dinilai pengawasan yang masih

kurang, di tengah suplai akomodasi wisata yang berlebihan.

“Demikian pula berkembang jenis akomodasi hostel yang disewakan per dipan (tempat tidur). Bayangkan satu kamar enam dipan dijual Rp50 ribu per dipan, ‘kan dapat Rp300 ribu. Ini juga ada dampak sosialnya, bagaimana rumah di Bali ada tiga pasang wisatawan masuk dalam satu kamar, mereka tidur sebagai suami istri, secara etika kurang pas,” ujar Cok Ace.

Terkait dengan harga minim yang ditawarkan penyedia akomodasi wisata, menurut dia, pemerintah tidak berwenang untuk mengaturnya. Untuk itu diserahkan ke asosiasi karena harga murah terkait dengan pelayanan yang diberikan kepada wisatawan. (ant)

Sekda : Jangan Percaya Pejabat Bisa Luluskan CPNS



Suasana pertemuan bertajuk "Pengawasan Ombudsman RI dalam Seleksi CPNS tahun 2018, Menuju Seleksi CPNS yang Kredibel dan Transparan" (Antaraneews Bali/Ni Luh Rhisma)

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengingatkan masyarakat di Pulau Dewata untuk tidak mempercayai jika ada oknum pejabat yang menjanjikan bisa mengatur atau menentukan kelulusan dalam seleksi CPNS 2018.

"Masyarakat kami imbau tidak lagi punya pikiran macam-macam, tidak minta tolong kesana kemari. Kalau ada yang mengatakan bisa menolong, tidak usah dipercaya, apalagi yang

sampai minta uang," kata Dewa Indra, saat menghadiri acara bertajuk "Pengawasan Ombudsman RI dalam Seleksi CPNS tahun 2018, Menuju Seleksi CPNS yang Kredibel dan Transparan" itu, di Denpasar, Kamis.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten dan kota menjadikan seleksi CPNS tahun ini sebagai upaya untuk membangun "trust" atau kepercayaan pada publik, agar pemerintah daerah

semakin dipercaya oleh rakyat.

Bahkan, pihaknya sudah bersurat ke Kapolda Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi proses seleksi CPNS.

"Tolong masyarakat beri kepercayaan pada kami, dan masyarakat bekerja dalam kerangka itu. Masyarakat jangan lagi percaya dan jangan punya pikiran bahwa para pejabat di daerah bisa mengatur dan menentukan kelulusan CPNS," ujarnya pada acara yang juga dihadiri sejumlah Ketua Panitia Seleksi CPNS Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota dan tim verifikasi seleksi CPNS itu.

Dewa Indra menambahkan bagi para pejabat maupun ASN yang terbukti menerima suap maupun gratifikasi dalam seleksi CPNS dan dapat dibuktikan

di pengadilan secara sah dan meyakinkan, maka ancamannya pidana. Di samping itu, menurut Keputusan bersama antara Menpan-RB, Kepala BKN, dan Mendagri, oknum tersebut dapat dipecat dengan tidak hormat.

"Seleksi ini diatur secara nasional, soalnya dari nasional, penyelenggaranya dari nasional, hasilnya juga disampaikan secara nasional. Kami panitia daerah hanya mengumumkan hasil tes yang diumumkan melalui CAT dan tidak akan mengubah sedikitpun," ucap mantan Kepala BPBD Bali itu.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatib mengatakan lewat pertemuan tersebut, pihaknya melihat telah ada komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menciptakan seleksi CPNS yang kredibel dan transparan. (ant)

Pemerintah Tiongkok Diharapkan Awasi Penjual Paket Wisata

Gubernur Bali Wayan Koster mengharapkan Pemerintah Tiongkok mengawasi warga negaranya yang menjual paket wisata ke Pulau Dewata.

"Kalau ada pelaku usaha wisata asal Tiongkok yang menjual paket wisata ke Bali dengan harga rendah, kami harap pemerintah Tiongkok ikut melakukan pengawasan dan menerapkan kontrol ketat," kata Koster saat menerima kunjungan Wakil Gubernur Provinsi Hainan, Tiongkok, Liu Pingzhi di Denpasar, Jumat.

Wayan Koster mengingatkan pelaku bisnis paket pelancong dari Negeri Tirai Bambu mematuhi aturan-aturan praktik usaha wisata di Bali sebagai destinasi yang berkelas.

Di sisi lain, Koster menyampaikan apresiasi karena hingga saat ini kunjungan wisatawan

Tiongkok selalu menempati posisi teratas.

"Saya mengharapkan kerja sama yang lebih konkret, antara lain, di bidang perdagangan dan infrastruktur," ujarnya.

Dalam bidang perdagangan, Koster ingin lebih banyak lagi hasil industri UMKM diserap pasar Tiongkok. Sementara di bidang infrastruktur, Koster berkeinginan banyak belajar dari Tiongkok yang sudah jauh lebih maju.

Sementara itu Wakil Gubernur Provinsi Hainan Liu Pingzhi menyambut baik harapan Gubernur Koster. Ia pun menyampaikan harapan agar kerja sama yang sudah terjalin dengan baik selama ini dapat ditingkatkan.

Menurutnya ke depan Hainan ingin lebih fokus menjalin kerja sama dengan Bali di bidang pariwisata dan perta-



Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan Wakil Gubernur Provinsi Hainan Tiongkok Liu Pingzhi di Denpasar (Antaraneews Bali/Ni Luh Rhisma)

nian.

"Kami mengapresiasi keberadaan pariwisata di Bali, untuk itu kami ingin belajar tentang penataan wisata," katanya seraya mengharapkan tingkat kunjungan wisatawan asal Bali maupun Indonesia ke Tiongkok juga meningkat.

Tak hanya itu, Hainan juga membuka peluang kerja sama di bidang pendidikan. Tak tanggung-tanggung, Pemerintah Hainan sudah menyiapkan 50 paket beasiswa untuk pela-

jar di Bali yang ingin mengikuti pendidikan di Hainan.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Koster didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali AA Gede Yuniartha Putra, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali IB Wisnuardhana dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra. (ant)

Wagub Bali: Tingkatkan Daya Saing UMKM



Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati saat membuka Sampoerna Retail Community (SRC) Festival Seminar Bisnis dan Trade Expo UMKM 2018 (Antaraneews Bali via Humas Pemprov Bali)

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mendorong pelaku UMKM di daerah itu untuk terus meningkatkan daya saing, di tengah derasnya arus globalisasi dan mulainya era Revolusi Industri 4.0.

“Para pelaku UMKM harus

terus bergerak karena kompetitor, lingkungan di sekitar kita juga terus bergerak dan jangan cepat berpuas diri. Terus tingkatkan jiwa kewirausahaan, mari berinovasi, dan tingkatkan daya saing sehingga kita tidak ketinggalan,” kata Wagub Bali yang akrab dipanggil Cok Ace itu, di Denpasar, Sabtu.

Menurut dia, persaingan antarpelaku usaha semakin ketat dan bebas, sehingga menghadapi tantangan tersebut, para pelaku usaha khususnya pelaku UMKM dituntut melakukan inovasi, meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga bisa bersaing dengan para pelaku usaha lainnya.

Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan penerapan teknologi modern yang bekerja

di setiap aktivitas ekonomi mulai tingkat produksi hingga konsumsi, ujar Cok Ace, tidak terlepas dari peran pemerintah guna menyediakan sarana dan prasarana yang bisa turut mendukung daya saing para pelaku usaha.

“Sesuai visi misi kami, as-tungkara (mudah-mudahan) kedepan seluruh desa pakraman (desa adat) di Bali bisa dilengkapi dengan wifi gratis sehingga sumbatan-sumbatan informasi bisa diatasi,” ucapnya saat membuka Sampoerna Retail Community (SRC) Festival Seminar Bisnis dan Trade Expo UMKM 2018 tersebut.

Mantan Bupati Gianyar itu juga menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan seminar yang dipandang bisa menjadi bentuk kampanye

kewirausahaan untuk menggugah kesadaran masyarakat menggali potensi yang dimiliki.

Sementara itu, Manager Area Retail Engagement Mada Rayata mengatakan Sampoerna memiliki komitmen yang besar untuk mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Kegiatan yang diselenggarakan itu bertujuan untuk menggali lebih dalam potensi para pelaku UMKM untuk menumbuhkan daya saing, kemandirian, dan kualitas kemampuan diri, sehingga pada akhirnya mereka diharapkan mampu mendorong roda perekonomian di tingkat nasional maupun daerah. (ant)

Pemprov Bali Perjuangkan “Bagi Hasil” Pariwisata

Pemerintah Provinsi Bali akan memperjuangkan dana bagi hasil dari sektor pariwisata karena selama ini kontribusi sektor pariwisata berupa Pajak Hotel dan Restoran menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

“Pemprov Bali praktis tidak memperoleh pemasukan dari sektor pariwisata,” kata Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) saat menerima Rombongan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Denpasar, Sabtu.

Wagub Cok Ace mengemukakan, saat ini Bali memiliki 130 ribu kamar hotel dan sebanyak 80 persen atau sekitar 98 ribu kamar berada di wilayah Kabupaten Badung. Hal itulah yang menurutnya menjadi salah satu pemicu kesenjangan pembangunan antarwilayah di Bali.

Mengatasi persoalan itu,

lanjut dia, selama ini Badung telah menyisihkan dana PHR yang diperoleh untuk dibagikan kepada kabupaten lain kecuali Gianyar dan Kota Denpasar..

“Namun demikian, Pemprov Bali tetap berkepentingan dengan dana bagi hasil dari sektor pariwisata yang nantinya akan dimanfaatkan untuk peningkatan infrastruktur antarwilayah serta peningkatan kualitas destinasi,” ucapnya.

Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan saat ini Gubernur Bali Wayan Koster tengah mematangkan regulasi agar Pemprov Bali bisa kecipratan dana dari sektor pariwisata.

“Sedang kami godok dan koordinasikan dengan pusat terkait payung hukumnya. Mengenai mekanismenya, apa nanti kita kerjasama dengan pihak bandara, itu juga masih dibahas,” ucapnya.



Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) saat menerima Rombongan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI (Antaraneews Bali via Humas Pemprov Bali)

Menurut Dewa Indra, orientasi Pemprov Bali bukan semata-mata memperoleh dana, namun untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kesinambungan pembangunan pariwisata dan budaya karena saat ini masih banyak yang perlu mendapat perhatian dalam upaya peningkatan infrastruktur penunjang kepariwisataan.

Selain itu, dia juga menyayangkan perjuangan memperoleh bagi hasil “airport tax” dari pihak pengelola

Bandara Ngurah Rai yang hingga kini belum membuahkan hasil.

Terkait dengan harapan itu, Wagub Cok Ace sangat berharap Banggar DPR RI dapat membantu perjuangan Bali karena daerah setempat menargetkan rampungnya sejumlah proyek infrastruktur diantaranya shortcut pada jalur Bedugul-Singaraja. Rampungnya shortcut itu diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh Denpasar-Singaraja. (ant)

Menkeu Afrika Selatan kunjungi MPP Denpasar



Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra menunjukan Mal Pelayanan Publik kepada Menteri Keuangan Kabinet Provinsi Western Cape, Afrika Selatan Ivan Meyer di Denpasar. (Antaraneews Bali via Humas Pemkot Denpasar)

Menteri Keuangan Kabinet Provinsi Western Cape, Afrika Selatan, Ivan Meyer, bersama rombongan mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan “Damamaya Cyber Monitor” (layanan pemantauan lewat kamera pemantau di sejumlah titik) Kota Denpasar, Bali.

“Menkeu Afrika Selatan dan rombongan berkunjung pada Senin (15/10) untuk melihat pelaksanaan MPP. Selain itu juga berkaitan den-

gan pembentukan dan penandatanganan (Latter Of Intent) kerja sama `Sister City`,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi, Humas Pemkot Denpasar, Wayan Hendaryana, di Denpasar, Selasa.

Ia mengatakan rombongan Menkeu Kabinet Western Cape, Afrika Selatan tersebut melihat secara langsung penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan “Damamaya Cyber Monitor” di Kota Denpasar, setelah menghadiri

pertemuan tahunan IMF-WB di Nusa Dua, Bali, 8-14 Oktober 2018.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Kabinet Provinsi Western Cape, Afrika Selatan, Ivan Meyer, mengatakan Denpasar sukses menerapkan pola pemerintahan kelas dunia. Hal itu diimplementasikan melalui beragam program dan inovasi yang salah satunya adalah “Denpasar Smart City”.

“Saya senang dapat berkunjung ke sini, dan selamat kepada Wali Kota Denpasar yang telah sukses mengakomodasi program-program inovatif dan tata pemerintahan berkelas dunia,” ucapnya.

Pihaknya mengapresiasi program “Community Based” di Denpasar yang menunjukkan penerapan program berbasis masyarakat yang sukses dan telah di apresiasi dunia.

Hal senada dikatakan Executive Major, Ald. Harry Levendel, bahwa pihaknya sangat

kagum terhadap seluruh elemen masyarakat memiliki ruang untuk berkontribusi.

Program-program di Kota Denpasar dibidang budaya, pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan kapasitas SDM patut diapresiasi.

“Denpasar dan Afrika Selatan memiliki banyak kesamaan dalam segala bidang, sehingga kerja sama LOI ini sangat tepat dalam mewujudkan “Sister City”, dan pertemuan tersebut membuat kami belajar banyak hal guna mempelajari tata pemerintahan dan inovasi pembangunan di Kota Denpasar serta mengembangkan dan melaksanakan di Afrika Selatan,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan bahwa penandatanganan (Latter Of Intent) LOI terkait kerja sama “Sister City” adalah bentuk kolaborasi yang sangat baik. (ant)

Denpasar Terpilih “Gerakan Menuju 100 Smart City”

Pemerintah Kota Denpasar, Bali, terpilih dan ditetapkan lulus dalam “Gerakan Menuju 100 Smart City” di Indonesia, yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar, I Dewa Made Agung di sela acara bimbingan teknis (bimtek) di Denpasar, Senin, mengatakan dengan penetapan dalam “Gerakan Menuju 100 Smart City” tersebut dalam langkah menyukseskan program nasional, maka pihaknya menyelenggarakan bimbingan teknis yang berkaitan dengan kota cerdas.

Ia mengatakan kegiatan bimtek pada tahap IV penyusunan masterplan `smart city` bertujuan mendalami program-program kerja yang

dilaksanakan pada masing-masing OPD yang berbasis “smart city”.

Dalam kesempatan tersebut seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar diberikan kesempatan untuk memaparkan program-program kerjanya. Hal ini menjadi bagian dari implementasi pelaksanaan “smart city” di berbagai program kerja yang saling bersinergi satu sama lainnya.

Sementara itu narasumber dari Executive Staf Kepresidenan Deputy 1, Robertus Theodore mengatakan selama bimtek dilakukan memang selalu ada perkembangan yang sangat baik dari masing-masing OPD Pemkot Denpasar.

“Kali ini seluruh OPD pre-



Pemerintah Kota Denpasar, Bali, terpilih dan ditetapkan lulus dalam “Gerakan Menuju 100 Smart City” di Indonesia. Foto AntaraNews Bali/Humas Kota Denpasar

sentasi program, tujuannya adalah untuk melihat dan mendalami rancangan program masing-masing OPD,” ucapnya.

Lebih lanjut Robertus mengatakan bahwa di masing-masing OPD diharapkan tidak ada program yang sama, melainkan semua program saling

melengkapi dan bersinergi.

“Kami akan selalu mendampingi dan tentunya kemas program `smart city` di Kota Denpasar, saat penutupan nanti akan dipresentasikan secara keseluruhan, saya yakin Denpasar bisa melakukan itu,” katanya. (ant)

Berturut-Turut Denpasar Raih Anugerah Pandu Negeri



Sekda Kota Denpasar, A.AN Rai Iswara mewakili Walikota Denpasar menerima penganugerahan Kota Denpasar yang dinobatkan sebagai pemerintah daerah dengan kinerja dan tata kelola yang sangat baik, Penganugerahan ini diserahkan Wakil Presiden RI periode 2009-2014 yang juga Ketua Dewan Penasehat IIPG, Boediono, Jumat malam (26-10-2018) di Jakarta. Foto AntaraNews Bali/Humas Pemkot Denpasar

Pemkot Denpasar kembali berhasil menjadi pemerintah daerah terbaik di Indonesia. Sebagai daerah satu-satunya di Bali, Denpasar berturut-turut meraih penghargaan Anugerah Pandu Negeri kategori terbaik tata kelola pemerintahan. Sebelumnya pada Tahun 2017 Kota Denpasar juga dinobatkan sebagai pemerintah daerah dengan kinerja dan tata kelola sangat

baik.

Penganugerahan tahun ini diserahkan Wakil Presiden RI periode 2009-2014 yang juga Ketua Dewan Penasehat IIPG, Boediono yang diterima Sekda Kota Denpasar, A.AN Rai Iswara mewakili Walikota Denpasar di Grand Sahid Hotel Jakarta Pusat, Jumat Malam (26/10)

Acara Anugerah Pandu Negeri yang kedua tahun ini oleh

IIPG (Indonesian Institute for Public Governance) dengan mengangkat tema “Membangun Tata Kelola dan Budaya Pemerintahan Daerah yang Bersih” Ajang pemberian penghargaan tahunan ini untuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota terbaik, serta pemimpin inovatif yang telah berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan sosio-ekonomi melalui reformasi tata kelola yang amanah, Ujarnya

Menurut Ketua IIPG, Sigit Pramono mengatakan bahwa Anugerah Pandu Negeri merupakan ajang pemberian penghargaan tahunan untuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia yang memiliki kinerja dan tata kelola terbaik, serta pemimpin inovatif yang berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan sosio-ekonomi melalui reformasi tata kelola. Menurut Sigit, penilaian dilakukan ter-

hadap 548 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota dan kota administrasi, dengan kriteria Aspek Performance, yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Pengembangan Manusia, dan Breakthrough Result (Transformative and Innovative). Disamping itu juga ada Aspek Governance yang meliputi Tata Kelola Keuangan, Tata Kelola Pemerintahan, serta Anti Korupsi, katanya.

Sementara Sekda Kota Denpasar, A.AN Rai Iswara mengatakan penghargaan ini menjadi prestasi kesekian kalinya yang diraih Pemkot Denpasar dalam bidang tata kelola pemerintahan. Penghargaan ini menjadi cambuk bagi Pemkot Denpasar dalam melakukan pembenahan-pembenahan menjaga pemerintahan yang bersih dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai harapan masyarakat. (ant)

DTIK Festival ke-6 Sajikan Inovasi Digital Kreatif Berbasis Budaya

Denpasar Teknologi Informasi dan Komunikasi (DTIK) Festival kembali dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Denpasar I Dewa Made Agung dengan didampingi Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Dewa Gede Rai, yang ditandai dengan pemukulan kulkul dan dilanjutkan atraksi permainan tradisional mecag-cag (melompat bamboo) di Taman Kota, Lumintang Denpasar, Kamis (25/10).

Sebagai ajang pameran teknologi informasi tahunan dengan melibatkan kalangan universitas, dan komunitas itu kini sudah memasuki tahun ke-6. Berlangsung selama empat hari dari tanggal 25 Oktober hingga 28 Oktober, gelaran ini turut menyajikan stand pameran Teknologi Informasi dan ka-

wasan kuliner Food Truk Denpasar hingga pameran motor custom dapat dijumpai selama empat hari penuh di DTIK Festival ini. Selain itu beragam hiburan rakyat juga turut memeriahkan kegiatan ini.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar, Dewa Made Agung, mengatakan Dtik festival ke-6 ini diselenggarakan Pemkot Denpasar sebagai wadah promosi dan pengenalan berbagai inovasi teknologi informasi terbaru. Pesatnya perkembangan teknologi pada era digital ini telah mendorong munculnya beragam teknologi baru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu, DTIK Festival hadir sebagai ajang berbagai perusahaan, sekolah, kampus dan komunitas IT memamerkan dan memperkenalkan be-



Pembukaan Dtik Festival ke-6, oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Denpasar I Dewa Made Agung. (Antaraneews Bali vias Humas Pemkot Denpasar/Komang Suparta)

ragam inovasi teknologi yang telah berhasil dikembangkan untuk disampaikan kepada masyarakat luas.

Pada pelaksanaannya yang keenam tahun ini DTIK Festival mengangkat tema “Digital Kreatif dan Interaktif Berbasis Budaya”. Berbeda dari tahun sebelumnya, kali ini DTIK Festival menghadirkan kolaborasi antara teknologi dengan permainan anak-anak tradisional. Dengan tujuan kem-

bali mendekatkan permainan tradisional kepada anak-anak, serta untuk mengimbangi dampak dari penggunaan gadget yang semakin pesat pada anak.

“Kami berharap dengan digelarnya Dtik Festival ini akan semakin memperkenalkan berbagai produk teknologi terbaru yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai bidang kehidupan umat manusia, karena dewasa ini tidak bisa terlepas dari teknologi,” katanya. (ant)

Pemkab Badung Terima Penghargaan Kementerian Keuangan



Wabup Badung, I Ketut Suiasa (kiri) menerima Penghargaan dari Kementerian Keuangan RI di Puspem Badung, Kamis (18/10). *Antaraneews Bali/Humas Badung*

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas keberhasilannya dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2017, dengan capaian standar tinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

“Penghargaan dari Kemenkeu ini dan opini Wajar Tanpa

Penegecualian (WTP) 2017 yang diberikan oleh pemerintah pusat ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung,” ujar Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, di Puspem Badung, Mangupura, Kamis.

Dalam kesempatan tersebut, penghargaan yang ditan-datangani oleh Menteri Keuan-

gan Sri Mulyani Indrawati itu diserahkan oleh Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Bali, Mohamad Yasin yang langsung diterima oleh Wabup Suiasa yang didampingi Kepala Inspektorat Badung, Luh Suryaniti, Kepala BPKAD, I Ketut Gede Suyasa, Sekretaris Bappeda I Ketut Wirawan dan Kabag Humas Badung Putu Ngurah Thomas Yuniarta.

Wabup Suiasa mengatakan, penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Badung itu, tidak hanya sebagai prestasi administrasi laporan keuangan namun juga merupakan pencapaian terkait laporan keuangan yang kredibel dan akuntabel.

“Selain benar-benar berorientasi pada pelayanan publik dan untuk kesejahteraan ma-

syarakat, laporan keuangan yang kredibel dan akuntabel juga merupakan pencerminan dari pengelolaan keuangan Pemerintahan Kabupaten Badung yang transparan,” ujarnya.

Ia mengatakan Pemkab Badung ke depannya dengan penghargaan dan dengan opini WTP yang berhasil diraih itu, artinya pemerintah tidak boleh melakukan hal-hal di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Penghargaan dan Opini WTP ini bagi Pemkab Badung merupakan cambuk untuk tetap bekerja secara benar dan transparan serta lebih berhati-hati. Semua itu tentunya untuk pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Badung,” katanya. (adv)

Badung Bentuk Tim Khusus Tertibkan “Pemangku” Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, akan membentuk tim khusus bersama ‘stakeholder’ pariwisata lain sebagai langkah strategis untuk menertibkan pariwisata di Bali, menyikapi isu penjualan paket wisata dengan harga yang sangat murah.

“Tim khusus ini merupakan langkah strategis dan terpadu untuk menertibkan permasalahan pariwisata secara bersama-sama yang akan dilakukan dalam waktu dekat dan harapan kami hal itu tidak hanya dilakukan di satu daerah saja tetapi di seluruh daerah di Bali,” ujar Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, saat menghadiri Focus Group Discussion bertajuk “Road to Quality Tourism” di kawasan Seminyak, Badung, Bali, Selasa.

Pertemuan yang dihadiri langsung oleh Wagub Bali, Tjok Oka Artha Ardana Sukawati, Kepala Badan Promosi Pariwisata

Daerah (BPPD) Badung, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, Kepala Dinas Pariwisata Badung, I Made Badra dan sejumlah pelaku pariwisata Kabupaten Badung tersebut digelar untuk membahas isu harga paket wisata Bali yang murah bahkan dengan harga yang tidak wajar.

“Jika tidak segera dilakukan langkah bersama untuk menyikapi permasalahan ini, dikhawatirkan kualitas kepariwisataan di Pulau Bali akan mengalami kerugian,” kata Wabup Suiasa.

Hal senada juga disampaikan Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace. Ia mengatakan, untuk menyikapi permasalahan pariwisata tersebut, harus dilakukan langkah-langkah kongkrit yang dimulai dari tingkat paling bawah hingga tingkat atas.

“Dari tingkat Banjar, Kelian desa dan semua tokoh adat



Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardana Sukawati (keempat kanan) dan Wabup Badung, I Ketut Suiasa (ketiga kiri) saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Road to Quality Tourism, Selasa (23/10). *Antaraneews Bali/Humas Badung*

duduk bersama untuk mencari jalan keluar yang terbaik, jika hal itu dibiarkan lebih lama maka akan menjatuhkan kami dan semuanya akan mendapatkan kerugian,” ujar Cok Ace.

Sebelumnya, Cok Ace mengatakan, pihaknya tidak memungkiri bahwa masih adanya kasus paket wisata murah di Bali karena dinilai pengawasan yang masih kurang, di tengah suplai akomodasi wisata yang berlebih.

“Demikian pula berkembang jenis akomodasi hostel yang disewakan perdipan (tempat tidur). Bayangkan satu kamar enam dipan dan dijual Rp50 ribu perdipan, kan dapat Rp300 ribu. Ini juga ada dampak sosialnya, bagaimana rumah di Bali ada tiga pasang wisatawan masuk dalam satu kamar, mereka tidur sebagai suami istri, secara etika kurang pas,” ujarnya. (adv)

Badung Promosikan Potensi Daerah Di Ajang “PINDesKel 2018”



Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa (kedua kiri) menyambut Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) saat pembukaan Temu Karya Nasional, Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDesKel) 2018 di areal Garuda Wisnu Kencana (GWK), Ungasan, Kabupaten Badung, Jumat (19/10). *AntaraneWS Bali via Humas Badung*

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, mempromosikan potensi yang dimiliki daerahnya, sekaligus menyosialisasikan berbagai kebijakan daerah pada kegiatan “Temu Karya Nasional, Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDesKel) 2018” di Jimbaran, Bali.

“Kami memanfaatkan kegiatan ini sebagai menyosialisasikan

kebijakandan sebagai ajang promosi daerah yang nantinya bisa diinformasikan kepada seluruh peserta. Hal itu akan kami akan paparkan dalam kegiatan lokakarya, dari situ akan terjadi jalinan komunikasi. Mudah-mudahan kebijakan kami ini dapat memberikan kontribusi untuk daerah lain,” ujar Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, saat menghadiri pembukaan keg-

iatan tersebut di kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK), Badung, Jumat.

Ia mengatakan, kegiatan Temu Karya Nasional yang dikaitkan dengan TTG dan PINDesKel itu juga merupakan sebuah media yang sangat bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara karena melalui forum tersebut, pemerintah pusat dapat mensinkronkan serta mampu mengintegrasikan kebijakan-kebijakan nasional yang harus diterjemahkan sampai ke level desa dan kelurahan.

“Dalam konteks tersebut, setiap daerah dalam hal ini desa dan kelurahan dapat langsung saling berinteraksi berkaitan dengan inovasi yang telah dilakukan, sehingga kemajuan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan di seluruh Indonesia tidak ada terlalu timpang,” katanya.

Kegiatan Temu Karya Na-

sional Gelar Teknologi Tepat Guna dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDesKel) 2018 tersebut merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa (PMD) Kemendagri dan Kementerian Desa PDTT, untuk mencari pencipta kreasi dan inovasi di daerah dalam pengembangan teknologi.

Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 7.000 orang peserta dari perangkat desa dan kelurahan, pemerintah kabupaten, pemerintah kota serta pemerintah provinsi se-Indonesia.

Pembukaan kegiatan tersebut ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo dan Gubernur Bali I Wayan Koster. (adv)

Badung Selenggarakan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai salah satu bentuk komitmen penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau “e-Procurement”.

“Diberlakukannya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendorong Pemkab Badung untuk mewujudkan “value for money” pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sesuai pasal 69, dimana penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik. Penyelenggaraan tersebut menggunakan sistem informasi yang terdiri dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukungnya,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, saat membuka ke-

giatan tersebut di Puspem Badung, Mangupura, Selasa.

Ia mengatakan, menurutnya kedepannya perlu disiapkan sumber daya manusia mulai dari pengguna anggaran, penguasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen yang harus mengetahui dan memahami betul bagaimana perencanaan dari pengadaan barang dan jasa.

“Kalau dilihat dari amanat Perpres 16 tahun 2018, fokusnya terlihat dari perencanaan. Harus fokus dalam proses perencanaan pengadaan. Jadi, sebelum pejabat pembuat komitmen membuat suatu perencanaan, harus benar-benar mengetahui apa manfaat dari pengadaan barang dan jasa tersebut,” katanya.

Sekda Adi Arnawa menambahkan, melalui pembinaan yang menghadirkan narasumber Kasubdit Peren-



Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa (tengah), Asisten Perencanaan dan Pembangunan Setda Badung Dewa Made Apramana (kiri) dan Narasumber Kasubdit Perencanaan Pengadaan, LKPP Hermawan (kanan) berbincang saat kegiatan Pembinaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2018 di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa (23/10). *AntaraneWS Bali/Humas Badung*

canaan Pengadaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hermawan tersebut, pihaknya berharap semua pejabat terkait pengadaan dapat mengetahui tahapan-tahapan maupun alur sehingga pengadaan barang/jasa akan jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Asisten Perencanaan dan Pengu-

nan Setda Badung Dewa Made Apramana menjelaskan, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Badung berfungsi untuk menjamin berjalannya ‘e-procurement’ dan mengelola sistem e-procurement. “LPSE memainkan peranan penting dalam memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik bagi para pemangku kepentingan,” katanya. (adv)

Pemkab Gianyar Luncurkan Angkutan Siswa Gratis



Bupati Gianyar I Made Mahayastra memberikan selamat dan berbincang dengan para pengemudi angkutan siswa trans Gianyar (Adi Lazuardi)

Pemerintahan kabupaten Gianyar meluncurkan Angkutan Siswa Trans yang gratis dengan cara memanfaatkan angkutan umum untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudinya, dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar yang cukup tinggi.

"Ini merupakan salah satu realisasi janji saya saat kampanye yakni merevitalisasi angkutan

umum menjadi angkutan siswa untuk meningkatkan kejayaan kehidupan pengemudi angkutan umum dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar," kata Bupati Made Mahayastra, di Gianyar, Jumat.

Peluncuran Angkutan Siswa Trans oleh Bupati Made Mahayastra dimulai pukul 14.00 wita di lapangan Astina Raya Gianyar dihadiri seluruh sopir

angkutan dan ratusan siswa. "Dengan angkutan siswa ini akan mengurangi beban biaya orang tua siswa sekaligus meningkatkan keselamatan siswa saat pergi ke sekolah," katanya.

Pemkab Gianyar telah mengalokasikan dana sebesar Rp7 miliar untuk merevitalisasi angkutan umum menjadi angkutan siswa Trans. "Saat ini, angkutan siswa trans baru beroperasi di kecamatan Gianyar dan kecamatan Blahbatuh. Kami akan terus membantu pengemudi angkutan umum untuk meremajakan kendaraannya agar lebih nyaman dan aman," janji Bupati.

Seiring dengan tersedianya angkutan siswa gratis ini, Pemkab Gianyar mengintruksikan sekolah-sekolah untuk melarang siswanya membawa motor ke sekolah.

Sekretaris Dinas Perhubungan Gianyar, Made Rai Ridharta ketika ditemui usai acara peluncuran menjelaskan lebih rinci tahun 2018 ini ada 75 unit angkutan siswa trans mulai dioperasikan dan semuanya milik masyarakat Gianyar dan tiga unit shuttle bus untuk pelayanan di Ubud sumbangan dari BNI dan BPD.

"Dengan diluncurkannya program angkutan siswa trans ini, prosentasi siswa yang menggunakan angkutan umum naik dari tujuh persen menjadi 15 persen dari sekitar 10.000 siswa di Gianyar. Tahun 2017, kami akan menambah 45 unit angkutan siswa sehingga totalnya yang beroperasi menjadi 120 unit dan prosentasinya naik menjadi 20 persen," janji Rai Ridharta. (ant)

Naik, Tarif Tujuh Destinasi Wisata Di Gianyar

Bupati Gianyar I Made Mahayastra akan menaikkan tarif wisata di tujuh destinasi wisata dari Rp15.000 menjadi Rp50.000 per orang, apalagi DPRD Gianyar sudah menyetujui kenaikan tarif tersebut.

"Akan naik dalam waktu secepatnya setelah peraturan bupati sudah siap. Ada tujuh destinasi wisata di Gianyar yang tarifnya dinaikkan," kata Bupati Made Mahayastra, usai melantik perbekel di kecamatan Gianyar dan Kecamatan Blahbatuh, Rabu, di Gianyar.

Tujuh objek wisata yang dikelola Pemkab Gianyar akan naik tarifnya dalam waktu dekat ini ialah Pura Tirta Empul, Goa Gajah, Gunung Kawi (Tampakiring), Gunung Kawi (Sebatu), Yeh Pulu, Alam Sidan dan Bukit Jati.

Bupati Gianyar berpendapat kenaikan ini sudah layak diterapkan lantaran di kabupaten lain rata-rata sudah melakukannya. "Objek wisata di kabupaten lain juga sudah banyak naik.

Contohnya Tanah Lot di kabupaten Tabanan sekarang sampai Rp50.000," jelasnya.

Bupati Mahayastra sehari-hari melakukan pelantikan pengurus perbekel di tujuh kecamatan di Gianyar secara maraton di tiga lokasi. Selain di kecamatan Gianyar dan kecamatan Blahbatuh, Mahayastra juga akan melantik perbekel di kecamatan Ubud, Tegallalang, Payangan, Tampaksiring, dan Sukawati.

Untuk Kecamatan Gianyar dan Blahbatuh pengambilan sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan perbekel dipusatkan di Wantilan Pura Samuan-tiga, Desa Bedulu Blahbatuh Gianyar. Perbekel yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah I Nyoman Gde Triyasa, SH sebagai Perbekel Desa Serongga. Ngakan Made Astawa sebagai Perbekel Desa Suwat, I Made Ardika sebagai Perbekel Desa Tulikup, I Ketut Berata sebagai Perbekel Desa Siangan, I Ketut Trisna Jaya, SS sebagai Per-



Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyematkan pangkat perbekel pada pelantikan perbekel di kecamatan Gianyar dan kecamatan Blahbatuh. Bupati melantik 24 orang perbekel se-kabupaten Gianyar secara maraton di 3 lokasi yang berbeda (Adi Lazuardi)

bekel Desa Belega, Gede Satya Kusuma, SH sebagai perbekel Desa Blahbatuh, I Gusti Putu Sarjana sebagai perbekel Desa keramas, dan I Gusti Nyoman Gede Susila sebagai perbekel Desa Bona.

Sedangkan Untuk Kecamatan Ubud, dan Kecamatan Sukawati pengambilan sumpah dan pelantikan perbekel dipusatkan di Wantilan Pura Taman Pule Desa Mas Ubud. Perbekel yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah I Dewa Nyoman Neka, SH

sebagai Perbekel Desa Kemenuh, I Made Karjana sebagai Perbekel Desa Singapadu Kaler, Drs. I Made Demontara sebagai Perbekel Desa Singapadu Tengah, I Nyoman Rupadana sebagai Perbekel Desa Celuk, I Made Dwi Sutaryantha sebagai Perbekel Desa Peliatan, I made Andika, S. Kom sebagai Perbekel Desa Sayan, I Wayan Gede Darmayuda sebagai Perbekel Desa Mas, dan I Dewa Gede Rai Dharmanta sebagai Perbekel Desa Kedewatan. (ant)

Pengelolaan Sampah Klungkung Menarik Perhatian Denmark



Utusan Kedutaan Besar Denmark mengunjungi Kabupaten Klungkung untuk melihat langsung program pengelolaan sampah TOSS, Minggu (28/10). (Antaraneews Bali/Humas Klungkung/2018)

Program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Kabupaten Klungkung, Bali menarik perhatian pemerintah Denmark, yang mengirimkan utusan lewat kedutaan besar negara tersebut.

“Program ini sudah kami jalankan sekitar satu tahun, perlahan tapi pasti mulai terlihat hasil dari pengelolaan sampah yang benar,” kata Sekretaris Daerah Klungkung I Gede Putu Winastira, yang menerima rom-

bong perwakilan Kedutaan Besar Denmark yang membidangi kerjasama sektor lingkungan hidup, Minggu.

Ia mengatakan, selama satu tahun berjalan ada beberapa kendala yang pihaknya hadapi seperti peralatan, teknologi dan yang lainnya, namun semua bisa diatasi lewat kerjasama dengan STT PLN yang digandeng dalam program ini.

Pihaknya berharap, dengan

kunjungan ini pemerintah Denmark bisa membantu pihaknya sehingga beberapa persoalan bisa teratasi, sehingga hubungan antara Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan pemerintah negara tersebut bisa saling mengisi.

“Selama di Klungkung, perwakilan dari Denmark akan melakukan observasi lapangan dilengkapi dengan dokumentasi. Dengan seperti itu, antara kami dengan negara itu bisa saling mengisi dalam artian program TOSS bisa diterapkan di Denmark, demikian juga sebaliknya,” katanya yang menerima rombongan ini bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Klungkung Anak Agung Ngurah Kirana.

Salah satu yang bisa dibantu pemerintah Denmark setelah mengunjungi Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan sebagai kawasan penerapan pro-

gram ini, menurutnya, adalah peralatan berteknologi pengelolaan sampah yang pihaknya butuhkan untuk lebih menyempurnakan program TOSS.

Sementara Kepala Bidang Kerjasama Sektor Lingkungan, Kedutaan Besar Denmark Morten Holm Van Donk mengatakan, kunjungannya ini merupakan tindak lanjut kerjasama antara pemerintahnya dengan Indonesia di bidang lingkungan hidup.

“Program ini sudah mendapatkan pengakuan di Indonesia, kami ingin melihat sendiri sehingga datang dan melakukan observasi lapangan disini,” katanya.

Terkait kebutuhan peralatan untuk menunjang program TOSS, ia mengatakan, pemerintahnya bisa memberikan bantuan dana untuk pengadaan mesin yang bisa dimanfaatkan program ini. (ant)

Bupati Klungkung Dorong Perusahaan Pekerjakan Penyandang Disabilitas

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mendorong perusahaan-perusahaan swasta untuk merekrut tenaga kerja dari kalangan penyandang disabilitas.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber seminar Inklusi Film Disabilitas Dan Exspo Produk Tenaga Kerja Disabilitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja, Selasa(30/10), demikian siaran pers dari Humas Klungkung diterima Rabu. “Kami di Kabupaten Klungkung sudah melakukan upaya nyata dengan memberikan kesempatan yang sama dalam dunia kerja bagi disabilitas,” katanya.

Ia mengatakan dirinya sudah bergelut dengan kehidupan disabilitas sejak tahun 1994, dengan mempekerjakan penyandang disabilitas di koperasi yang ia pimpin.

Saat menjadi kepala daerah tahun 2014, katanya, apa

yang sudah ia lakukan itu dilanjutkan namun dalam lingkup yang lebih luas yaitu sebagai kebijakan dan program Pemkab Klungkung. “Penyandang disabilitas tetap memiliki potensi untuk hidup sejahtera. Jika pemerintah bisa mendorong semua sektor untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, maka saya yakin tingkat kemiskinan akan menurun,” katanya.

Ia juga mengingatkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan 1 persen penyandang difabel dari total pekerjanya, sedangkan perusahaan BUMN/ BUMD sebanyak 2 persen.

Untuk memotivasi agar penyandang disabilitas produktif, menurutnya, setiap bulan Pemkab Klungkung rutin memberikan pelatihan seperti kerajinan tangan, tekstil



Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta (tiga dari kanan), saat menjadi narasumber di Kementerian Tenaga Kerja terkait program bagi penyandang disabilitas, Selasa (30/10). (Antaraneews Bali/Humas Klungkung/2018)

komputer, multimedia dan lain-lain. “Kami melakukan pemetaan terhadap penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Pada tahun 2018, dari 1.640 penyandang disabilitas kami seleksi yang masih usia produktif, lalu kami beri pelatihan dan 19 diantaranya telah bekerja di lingkungan pemerintah, sementara sisanya kami dorong bekerja di sektor swasta,” katanya.

Saat bekerja, penyandang disabilitas harus memiliki ikatan kerja yang jelas dengan perusahaan, serta perusahaan

harus memberikan kesempatan kerja kepada mereka.

Melihat potensi yang dimiliki penyandang disabilitas, menurutnya, sudah saatnya baik pemerintah maupun swasta memperkuat komitmen dan berpihak kepada penyandang disabilitas. “Hal itu hari dilakukan, demi terwujudnya masyarakat inklusif tanpa melihat latar belakang apapun. Menyandang disabilitas atau tidak, mereka harus memiliki kesempatan dan ruang yang sama untuk bisa bekerja, berkarya, dan berkontribusi untuk negeri,” katanya. (ant)

Bupati : Usia 23 Tahun Tak Punya E-KTP, Dianggap Meninggal



Bupati Bangli I Made Gianyar (dua kiri) saat menggelar sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan. (AntaraneWS Bali via Humas Pemkab Bangli)

Bupati Bangli I Made Gianyar mengatakan penduduk berusia 23 tahun, bila belum melakukan perekaman sampai 31 Desember 2018, untuk sementara datanya akan dinonaktifkan dari data base kependudukan, karena yang bersangkutan dianggap sudah tak ada atau meninggal dunia.

Bupati mengatakan hal itu saat menggelar sosialisasi ke-

bijakan administrasi kependudukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.

"Apapun bentuknya, semua administrasi itu sangat penting. Sama halnya dengan administrasi kependudukan. Saat belum butuh, masyarakat banyak yang acuh tak acuh untuk

mengurus. Tetapi kalau ada keperluan mendadak, baru sibuk mengurus," kata Bupati pada Acara yang digelar di ruang pertemuan Dinas PKP Bangli, demikian keterangan pers, DisKOMINFO Bangli, Rabu.

"Misalkan mau kerja ke kapal pesiar, harus mengurus SKCK. Sebelum mengurus SKCK harus punya E-KTP. Kemudian datang ke kantor Dukcapil marah-marrah, bilang pelayanan tidak baik. Ngurus E-KTP aja lama. Padahal kalau dipahami mengurus E-KTP tidak lama, tetapi karena serba mendadak, akhirnya yang disalahkan pemerintah," tambah dia.

Acara ini dihadiri oleh para Camat se-Kabupaten Bangli dan kelihan banjar yang masyarakatnya paling banyak belum melakukan perekaman E-KTP.

Melalui kesempatan ini, Bu-

pati Made Gianyar mengajak semua pihak, khususnya masyarakat yang belum melakukan perekaman E-KTP, untuk segera melakukan perekaman. Apalagi dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyatakan bahwa

Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bangli I Nyoman Sumantra mengatakan, sesuai dengan data Disdukcapil Bangli, sampai dengan 17 April 2019, seharusnya ada sekitar 190 ribu lebih warga Bangli yang bisa memiliki E-KTP. Namun hingga bulan Oktober 2018, yang sudah memiliki EKTP baru sekitar 174 ribu lebih. Sehingga masih ada sekitar 15 ribu data kependudukan di Bangli yang masih bias atau perlu perbaikan. (ant)

Bupati Bangli Bentuk Tim Peneliti Kebudayaan

Bupati Bangli I Made Gianyar akan membentuk tim peneliti kebudayaan dengan tugas khusus untuk mendata semua situs-situs peninggalan kuno, termasuk sejumlah pura kuno yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya guna melestarikan situs cagar budaya di kabupaten Bangli.

"Tim ini akan dikomandoi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bangli," kata Bupati Made Gianyar saat membuka Kemah Cagar Budaya tingkat Provinsi Bali tahun 2018 di Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Bangli dalam keterangan pers yang diterima Rabu, di Bangli.

Menurut Bupati Made Gianyar, cagar budaya sebagai warisan budaya masa lalu, merupakan akar dari kebudayaan masa kini. Sehingga cagar budaya harus dilindungi, karena memiliki nilai penting bagi sejarah ilmu pen-

getahuan, pendidikan dan kebudayaan yang mengandung nilai-nilai luhur kehidupan dimasa lalu.

"Nanti setelah tim terbentuk, tim bekerja dan semua situs cagar budaya sudah didata, kita akan tindaklanjuti dengan instrumen produk hukum. Apakah itu Perbup atau Perda. Intinya untuk melindungi keberadaan situs cagar budaya," katanya.

"Selama ini mungkin banyak situs cagar budaya di Bangli yang sudah dibongkar masyarakat akibat ketidaktahuan. Ia mencontohkan, misalkan ada pura kuno yang dipugar dengan batu hitam karena sudah rapuh. Padahal pura kuno ini memiliki nilai sejarah, namun karena kurang pemahaman dan ketidaktahuan, pura dipugar dengan bentuk yang berbeda.

Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya



Bupati Made Gianyar bersama peserta Kemah Cagar Budaya tingkat Provinsi Bali tahun 2018 di Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Bangli (AntaraneWS Bali via Humas)

Bali I Wayan Muliarsa mengatakan kemah cagar budaya merupakan program internalisasi budaya yang dikemas dalam bentuk kegiatan yang menitikberatkan pada upaya pengenalan, penguatan dan pengembangan kebudayaan dikalangan generasi muda.

"Pada prinsipnya, kemah cagar budaya merupakan kegiatan pembinaan generasi muda yang bersifat edukatif, inovatif, kreatif, produktif dan

rekreatif untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Purbakala ke-105"ujarnya.

Kemah cagar budaya yang baru pertama kali diselenggarakan ini, diikuti oleh 152 orang peserta dari perwakilan pelajar SMA se-Bali, perwakilan mahasiswa dari Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, perwakilan sekaa teruna Desa Manikliyu dan guru pendamping. (ant)

Jembrana Tanggung Warga Belum Miliki BPJS



Kepala Dinas Kesehatan Jembrana, dr Putu Suasta, MKes (kiri) di Negara. (Antaraneews Bali/Gembong Ismadi)

Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, menanggung biaya pengobatan bagi warganya yang belum memiliki atau belum menjadi peserta jaminan kesehatan dari BPJS.

“Program ini untuk membantu warga yang belum masuk sebagai peserta BPJS, tapi bisa jadi hanya program

sementara, karena mulai tahun depan seluruh program jaminan kesehatan dilebur ke dalam BPJS,” kata Kepala Dinas Kesehatan Jembrana dr Putu Suasta, MKes, di Negara, Jembrana, Selasa.

Ia mengatakan, untuk menanggung biaya pengobatan lewat program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jembrana ini, pemerintah kabupaten setempat mengalokasikan dana Rp11 miliar, yang terbagi untuk RSUD Negara Rp7 miliar serta Puskesmas dan rumah sakit rujukan Rp4 miliar.

Menurutnya, setiap warga yang berobat ke RSUD Negara, Puskesmas serta dua rumah sakit rujukan yaitu RSUD Tabanan dan RS Sanglah, bisa dibiayai dari program ini dengan syarat tidak memiliki jaminan kesehatan lainnya.

“Tapi kalau menggunakan program ini tidak bisa naik kelas perawatan, pasien harus kelas tiga. Kalau BPJS yang membayar premi secara mandiri kan bisa naik kelas,” katanya.

Pemkab Jembrana mengeluarkan program ini karena jumlah masyarakatnya yang belum ikut sebagai peserta jaminan kesehatan oleh BPJS mencapai ribuan orang, yang juga membutuhkan pelayanan kesehatan.

Namun, saat program ini dilebur jadi satu dengan BPJS, yang informasinya akan dilakukan mulai tahun 2019, pihaknya siap menjalankan hal tersebut, termasuk mulai merancang alokasi anggarannya.

Saat menjadi satu dengan BPJS, ia mengatakan, pembayaran premi untuk masyarakat

akan ditanggung bersama antara pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Bali, yang khusus untuk Kabupaten Jembrana diperkirakan pemerintah setempat harus menanggung biaya premi Rp20 miliar, sedang pemerintah provinsi Rp60 miliar.

“Memang cukup besar nilai premi yang harus kami bayar. Dengan pertimbangan tahun depan sudah menjadi satu dengan BPJS, kami tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jembrana untuk tahun 2019,” katanya.

Program jaminan kesehatan yang dibiayai Pemkab Jembrana ini cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti yang disampaikan Kepala Dusun Kelapa Balian Ali Rahman. (ant)

Jembrana Ikut Pagelaran Budaya di TMII

Kabupaten Jembrana dan ikut dalam pagelaran Pesona Budaya Provinsi Bali dengan menampilkan berbagai seni budaya daerah tersebut di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

“Selain kesenian dan budaya, kami juga akan mengadakan pameran produk kerajinan serta kuliner khas Jembrana,” kata Bupati Jembrana I Putu Artha, di Negara, Rabu.

Dalam kesempatan tampil di TMII dari tanggal 2 - 3 November 2018, ia mengatakan pihaknya akan maksimal memanfaatkannya untuk mengenalkan Kabupaten Jembrana termasuk objek-objek wisata yang ada di daerah ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Dan Budaya Jembrana Nengah Alit mengatakan, pihaknya akan mengirimkan 338 peserta yang terdiri dari seniman, perajin serta pendamping dari Pemkab Jembrana.



Bupati Jembrana I Putu Artha (tengah) menyampaikan rencana Pemkab Jembrana untuk tampil di Taman Mini Indonesia Indah dengan membawa kesenian, kuliner serta promosi pariwisata, Rabu (31/10). (Antaraneews Bali/Gembong Ismadi)

Di Taman Mini Indonesia Indah, Jembrana akan menampilkan lima tarian tradisional serta instrumen musik yang dikolaborasikan dengan puisi. “Dengan tampil di TMII yang merupakan salah satu ikon budaya Indonesia, kami berharap Kabupaten Jembrana lebih dikenal baik seni, budaya, kuliner maupun pariwisatanya,” katanya.

Salah satu jenis kesenian yang akan ditampilkan adalah musik tradisional jegog, yang

merupakan kesenian musik khas Kabupaten Jembrana yang menggunakan bambu untuk menghasilkan bunyi yang berirama dan harmonis.

Ia mengungkapkan sebagai kesenian yang khas, jegog sudah mendapatkan sertifikat dari pemerintah sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Meskipun tidak dalam bentuk aslinya, budaya atraksi pacuan kerbau makepung yang juga merupakan budaya khas Jembrana juga akan ditampilkan

kan dalam bentuk tarian.

Sedangkan untuk kerajinan, Alit mengatakan pihaknya akan memamerkan kain tenun, kerajinan anyaman bambu, batok kelapa, jam kayu, kerajinan berbahan logam, rajutan, dupa, kerajinan dari daur ulang koran bekas serta plastik.

Untuk kuliner, pengunjung akan disuguhi jajan bendu, klepon dan betutu, termasuk produk VCO, kopi dan madu. (ant)

Buleleng Jajaki Ekspor Buah Naga ke Tiongkok



Tim General Administration of Customs People's Republic of China (GACC) bersama pejabat Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian berkunjung ke Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali, Kamis (25/10). (Antaraneews Bali/Made Adnyana)

Pemkab Buleleng mulai menjajaki ekspor buah naga ke Tiongkok setelah tim General Administration of Customs People's Republic of China (GACC) bersama pejabat Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian berkunjung ke Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali, 25 Oktober.

"Dalam kunjungan itu, Kepala Seksi Karantina Tumbuhan Badan Karantina Pertanian Kementan Irsan Nuhanto menilai peluang (ekspor) itu ada, karena buah naga dari Buleleng

memiliki ukuran yang lebih besar dan rasa yang lebih manis dibandingkan dengan buah dari negara lain," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Ir. Nyoman Genep, MT, di Singaraja, Buleleng, Jumat.

Selama ini, katanya, Tiongkok mengimpor buah naga dari Thailand dan Vietnam, tapi buah naga dari Buleleng memiliki keunggulan dari segi ukuran dan rasa. Selain itu, kalau buah naga dari Buleleng dibelah tidak rusak, sedangkan buah yang sama dari Negara Vietnam dan

Thailand itu cepat rusak. "Nah, inilah keunggulan buah naga kita," katanya.

Kunjungan lapangan (on site visit) ke kebun produksi buah naga di Buleleng oleh tim GACC itu dilakukan untuk melakukan kajian analisis terhadap produksi buah naga di Buleleng. Perkebunan buah naga yang dianalisa adalah perkebunan buah naga milik I Wayan Kantra. Perkebunan dengan luas 14 hektare itu terletak di Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan.

Dalam kunjungan lapangan tersebut, tim GACC melakukan analisis dengan mengambil sampel buah dan sampel hama yang ada di pohon buah naga milik I Wayan Kantra. Sampel tersebut nantinya akan diuji terlebih dahulu. Tim GACC juga mencoba rasa buah naga milik I Wayan Kantra.

"Pemkab Buleleng terus mendukung petani di Buleleng dengan melakukan pembinaan terkait kualitas buah ekspor dan terus mengembangkan

pertanian berbasis organik, karena hasil perkebunan yang berbasis organik lebih mudah untuk menembus pasar ekspor. Itu merupakan tahap awal untuk memulai merambah pasar ekspor buah naga Buleleng," katanya.

Secara terpisah, pemilik kebun buah naga di Kubutambahan, I Wayan Kantra, mengatakan pihaknya selama ini memang menggunakan pupuk organik. "Itu dilakukan untuk menyambut peluang pasar ekspor. Selama ini, buah naga kami sudah pernah diekspor ke Jerman dalam bentuk olahan," katanya.

Untuk buah segarnya, ia mengaku pernah mengekspor buah naga ke Hongkong, namun biaya operasional ekspor ke Hongkong memang sangat mahal, sehingga tidak ada ekspor lagi. Untuk ekspor ke China, pihaknya menunggu keputusan kelayakan dari tim GACC. Selain itu, ia juga menunggu harga yang ditawarkan dari investor China. (ant)

100 Persen Warga Buleleng Nikmati Aliran Listrik

Sebanyak 100 persen penduduk di Kabupaten Buleleng, Bali, sudah menikmati listrik atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang masih mencapai 92,84 persen.

"Itu rasio elektrifikasi atau tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan jumlah penduduk di suatu wilayah di Kabupaten Buleleng pada tahun ini," kata General Manager (GM) PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali, Nyoman Suwarjoni Astawa, di Singaraja, Buleleng, Bali, Senin.

Menurut Suwarjoni, secara fakta dapat dikatakan seluruh rumah di Kabupaten Buleleng sudah teraliri listrik. Ada yang teraliri listrik sebagai pelanggan PLN langsung maupun masih menumpang di tetang-

ga atau orang tuanya.

"Bagi listrik yang masih menumpang di tetangga atau di orang tua, kedepan disarikan menjadi pelanggan PLN. Dalam waktu lima hari listrik sudah menyala," kata Suwarjoni.

Ia menambahkan survei yang dilakukan PLN mencatat hanya 113 rumah yang belum dialiri listrik. Dari 113 rumah tersebut, 14 rumah memakai listrik dengan tenaga solar cell atau panel surya, karena kondisi alam.

"Itu karena jaringan yang tidak mungkin dipindah atau ditarik lagi ke daerah tersebut yang berada jauh seperti di puncak-puncak gunung atau jauh dari akses jalan. Kedepan, ketika akses jalannya sudah semakin baik, kami akan tarik jaringan ke daerah-dae-



Ilustrasi - Petani beraktivitas di sawah dengan latar belakang tower sutet di kawasan Tawang Sari, Sukoharjo, Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

rah tersebut," katanya.

Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Setda Buleleng, Made Arya Sukerta, mengapresiasi PLN karena seluruh masyarakat Buleleng sudah teraliri listrik di rumah mereka.

"Kami mengharapkan kepada PLN ke depan untuk menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR)-nya

untuk penyediaan air bersih. Jadi, bukan hanya bedah rumah, tapi juga air bersih," katanya.

Sebelumnya, GM PLN UID Bali, Nyoman Suwarjoni Astawa, melakukan pencaanangan rasio elektrifikasi 100 persen di Desa Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, 25 Oktober lalu. (ant)

BRI-Pertamina Tawarkan Diskon Untuk Dongkrak Transaksi Nontunai

Bank BRI dan Pertamina menawarkan diskon sebesar 10 persen apabila membeli BBM nonsubsidi dengan membayar menggunakan kartu bank tersebut untuk mendongkrak transaksi nontunai di Bali.

“Dengan begitu, semakin banyak transaksi di SPBU tanpa perlu menggunakan tunai,” kata Vice President Bank BRI Kanwil Denpasar Hery Santoso di Denpasar, Selasa.

Potongan harga sebesar 10 persen yang ditawarkan itu nantinya dapat digunakan untuk pembelian “bright gas”, pelumas, dan cuci kendaraan di “Red Car Wash” serta gratis nitrogen di SPBU.

Untuk mendapatkan diskon tersebut, konsumen harus membeli BBM nonsubsidi jenis “pertamax series” salah satunya seperti pertamax, pertalite, Pertamina dex, dextrite dan perta-

max turbo menggunakan kartu BRI seperti uang elektronik Brizzi, debit, kartu kredit atau kartu bank lain di EDC BRI.

Syarat mendapatkan diskon itu, kata dia, konsumen wajib memiliki dan menunjukkan kartu uang elektronik Brizzi edisi khusus “Berkah Energi Pertamina” (BEP) saat pembelian.

Kartu itu juga dapat digunakan sebagai alat bertransaksi membeli BBM nonsubsidi tersebut apabila saldo mencukupi. Bank BUMN itu menargetkan mencetak sekitar 1.000 kartu Brizzi BEP selama program tersebut mulai 23 Oktober 2018 hingga 31 Juli 2019.

Sementara itu Sales Executive Ritel” X Pertamina Pemasaran Bali Dany Hutama Aji menambahkan kartu uang elektronik edisi BEP itu bisa dibeli seharga Rp25 ribu (tanpa saldo) di 16 SPBU di Bali yang



Ilustrasi - Petugas melayani pembelian BBM nonsubsidi (ANTARA FOTO/Herman Dewantoro)

menjalankan program diskon tersebut.

Dia menjelaskan 16 SPBU itu di antaranya berada di Badung, Denpasar, Klungkung, Singaraja dan Amlapura. Dipilihnya 16 SPBU itu karena memiliki kinerja penjualan yang baik dan memiliki infrastruktur memadai untuk mendukung transaksi nontunai.

SPBU tersebut, kata dia, juga akan mengikuti kompetisi dengan minimal transaksi nontunai tiap bulannya mencapai 150 kali transaksi nontunai.

“Kami harap transaksi nontunai bisa naik 10-20 persen di 16 SPBU tersebut dan jika program ini sukses akan kami perluas ke SPBU wilayah lainnya,” katanya. (ant)

Tim Itjen Kominfo Apresiasi Kemitraan ANTARA-Pemprov-Media di Bali



Tim Itjen Kominfo yang dipimpin Auditor Ahli Kominfo Drs Moestamin Noer MSI (5/kanan) saat melakukan monitoring-evaluasi bersama Tim LKBN Antara Biro Bali di Humas Pemprov Bali, 29 Oktober 2018, yang diterima Kabag Dokumentasi dan Data Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali IB Surja Manuaba (5/kiri). (Foto Antaranews Bali/Itjen Kominfo)

Tim Itjen Kominfo yang dipimpin Auditor Ahli Kominfo Drs Moestamin Noer MSI mengapresiasi kemitraan yang dilakukan LKBN Antara Biro Bali dengan jajaran Humas Pemprov Bali dan media massa di Pulau Dewata yang dinilai cukup membanggakan.

“Cukup membanggakan. Kemitraan yang terjalin cukup akrab, bahkan kontribusi An-

tara di Bali juga cukup besar. Informasi yang diproduksi Antara juga banyak menjadi referensi jajaran pemerintah dan media di sini,” kata Moestamin dalam monitoring-evaluasi LKBN Antara di Bali, 28-31 Oktober 2018.

Oleh karena itu, ia mengharapkan para mitra Antara dari jajaran humas dan media massa selalu memberi ma-

sukan kepada Antara secara langsung atau melalui Kominfo untuk kebaikan bersama. “Antara adalah kita, dan kita adalah Antara. Artinya, Antara itu milik kita, milik Kominfo, milik humas, milik media, dan milik bangsa ini,” katanya saat melakukan monitoring ke kantor Humas Pemprov Bali dan tiga kantor media massa di Bali sebagai sampel.

Di kantor Humas Pemprov Bali, tim Itjen Kominfo yang berjumlah empat orang dengan didampingi Rini Utami (LKBN Antara Pusat) serta Edy M Yakub (LKBN Antara Bali) itu diterima Kabag Dokumentasi dan Data Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali IB Surja Manuaba yang didampingi Kasubag Media Humas Pemprov Bali I Ketut Yadhya dan Tim Humas Pemprov Bali.

“Biro Humas Pemprov Bali memang berbeda den-

gan provinsi lain, karena sejak tahun 2017 ada atensi dari pimpinan bahwa informasi umum ditangani Kominfo secara terpisah, sedangkan Biro Humas lebih bersifat khusus untuk informasi lokal terkait Bali. Jadi, humas adalah Jubir Gubernur,” kata Surja.

Oleh karena itu, tugas Biro Humas Pemprov Bali tidak lagi menyampaikan informasi secara umum, namun lebih bersifat spesifik untuk Bali dengan dua tugas dari Gubernur yakni melakukan sosialisasi dan menyerap aspirasi masyarakat.

Untuk sosialisasi itu, strategi yang dilakukan adalah bekerja sama dengan empat jenis media yakni media non-elektronik, media elektronik, media sosial, dan media tradisional. Khusus LKBN Antara, pihaknya sudah cukup lama bekerja sama dan berjalan cukup baik. (ant)

Enam Negara Ikuti Konferensi Internasional Bahasa-Budaya Oleh Undiksha

Ratusan peserta dari enam negara mengikuti “International Conference on English Across Cultures (ICEAC)” atau Konferensi Internasional pada Bidang Bahasa Inggris dan Budaya yang diadakan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Bali, 19-20 Oktober 2018.

“Konferensi yang dilaksanakan di Fakultas Bahasa dan Seni Undiksha adalah yang ke-4 dan bertujuan membangun sebuah jaringan dan kolaborasi di dunia akademik dari berbagai lintas disiplin,” kata Ketua Panitia, Made Hery Santosa, Ph.D, di Singaraja, Buleleng, Bali, Jumat.

Sehari sebelum konferensi dimulai, telah dilaksanakan pra-konferensi tentang penerbitan manuskrip di jurnal internasional terindeks dari salah satu pembicara utama Prof. Jayakaran Mu-

kundan dari Universiti Putra Malaysia.

Konferensi memfokuskan pada pentingnya publikasi riset di jurnal internasional untuk sosialisasi hasil penelitian ke dunia luar dan membuka peluang kerja sama, kolaborasi di skala internasional.

“Keberagaman strategi, model pembelajaran, metode di bidang pembelajaran Bahasa Inggris, linguistik dan kesusastraan akan dibawa dalam panel-panel diskusi. Salah satu pembicara kunci dalam konferensi ini adalah Prof. Jayakaran Mukundan yang membawakan materi tentang pembelajaran yang baik akan menghasilkan riset yang baik,” katanya.

Selain Prof. Jayakaran juga hadir Dr. Gumawang Jati, seorang pakar pembelajaran Bahasa Inggris dari Institut



Suasana konferensi internasional bertajuk “Conference on English Across Cultures” (ICEAC) atau Konferensi Internasional pada Bidang Bahasa Inggris dan Budaya yang diadakan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Bali, 19-20 Oktober 2018. (Foto Antaranews Bali/Made Adnyana)

Teknologi Bandung, Claire Bradin Siskin, seorang pakar Bahasa Inggris dari Amerika, Dang Tan Tin PhD. Dari Vietnam dan David Bradbury dari lembaga IALF Bali.

Dalam konferensi dengan peserta dari enam negara itu, jumlah presenter dan peserta adalah 135 orang, yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, Inggris, USA, dan Australia. Dari Indonesia, presenter dan peserta berasal dari Malang, Yogyakarta, Jember, Jakarta,

Surabaya, Denpasar, Singaraja, Surakarta, Bandung, Jambi, Padang, Samarinda, Karawang, Gorontalo, Semarang.

Hery Santosa mengatakan penyelenggaraan ICEAC ini akan berdampak banyak. Dalam jangka pendek diharapkan akan semakin beragamnya informasi dan pola-pola pembelajaran inovatif dan efektif dalam bidang bahasa Inggris, kesusastraan, linguistik, penerjemahan, dan seni di Undiksha. (ant)

Rektor ISI: Pengembangan Seni Jangan “Membabi-Buta”



Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Prof Dr I Gede Arya Sugiarta berfoto bersama para pembicara dan panitia seminar internasional (Antaranews Bali/Ni Luh Rhisma)

Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Prof Dr I Gede Arya Sugiarta mengharapkan para mahasiswa dan seniman jangan sampai mengembangkan seni dengan “membabi-butu” yang akhirnya dapat menghilangkan unsur identitas diri dan budaya setempat.

“Identitas kesenian kita banyak keunikan, banyak

kekhasan, dan itu dikagumi oleh mancanegara. Itu tidak boleh hilang, itu saya anggap sebagai ‘barang mahal’ yang harus dipelihara dengan baik,” kata Prof Arya Sugiarta disela-sela seminar internasional bertajuk “Art, Creativity and Identity” itu di Denpasar, Selasa.

Menurut dia, tema yang diangkat dalam seminar inter-

nasional tersebut sangat relevan dengan kondisi perkembangan pesat kreativitas kesenian Bali dan Indonesia pada umumnya, agar jangan sampai kehilangan jati diri.

“Oleh sebab itu, harus dicarikan cara-cara, agar di satu sisi kreativitas tetap kuat, akan tetapi jangan menghilangkan identitas. Kreativitas jangan sampai kebablasan,” ucap Prof Arya yang juga menjadi pembicara utama pada seminar oleh Program Doktorat ISI Denpasar itu.

Prof Arya mengemukakan sejumlah masukan agar identitas kesenian Bali tetap terjaga yakni para seniman harus tetap memiliki sikap profesional, memiliki keterampilan dan keahlian.

“Namun, harus tetap diingat diri sendiri, kita ini siapa dan lahir dimana? Tidak boleh dengan pengembangan

seni yang ‘membabi buta’ dan harus memiliki konsep,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, hendaknya tetap menghargai karya seni dari daerah lain, cara pandangnya juga, serta yang baik kemudia dicontoh dan digunakan memperkaya apa yang dimiliki.

“Lewat seminar ini untuk memberikan wahana diskusi bagi para mahasiswa dengan narasumber dari luar negeri yang tentu memahami aspek penting dari kesenian Indonesia,” kata Prof Arya.

Sementara itu, Ketua Panitia Seminar Prof Dr I Wayan Dibia mengatakan lewat seminar internasional tersebut menjadi wahana untuk lebih memahami, mendengar perkembangan baru dalam dunia kreativitas seni, terutama dalam persoalan identitas. (ant)

Bupati Karangasem Mas Sumatri Buka TMMD ke-103 Tahun 2018

Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri membuka acara TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-103 tahun 2018, di Dusun Guminten Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali, Senin.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Mas Sumatri setelah bertindak sebagai inspektur upacara dalam apel pembukaan. Turut hadir dalam upacara tersebut Sekda Kabupaten Karangasem I Gede Adnya Mulyadi, Wakil DPRD Provinsi Bali I Nyoman Suyasa dan Ketua DPRD I Nengah Sumardi, Dandrem Am Suaharyadi, Dandim 1623, Kapolres dan para kepala OPD di Lingkungan Pemkab Karangasem.

Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutan yang dibacakan Bupati Mas Sumatri mengatakan TNI Manunggal Membangun Desa, dilaksanakan dalam upaya

pemberdayaan masyarakat, sekaligus membangun keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung proses Pembangunan. Keterlibatan TNI dalam pembangunan di Desa pada hakikatnya merupakan bentuk nyata bahwa kemanunggalan TNI dengan masyarakat harus tetap terpelihara dengan baik dalam mengakselerasi proses pembangunan di desa, sebagaimana yang menjadi amanat butir ke-3 dari Nawacita, yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran atau dari Desa.

Perubahan mendasar dalam sikap dan mental yang lebih dikenal dengan istilah Revolusi Mental yang diikrarkan pada tahun 2015 merupakan suatu gerakan secara menyeluruh dan harus dimaknai sebagai suatu gerakan fundamental baik dari cara pandang, cara pikir, dan cara kerja segenap elemen bangsa yaitu tataran pemerintah. TNI



Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri membuka acara TNI Manunggal Desa ditandai pemukulan gong. (AntaraneWS Bali via Humas Pemkab Karangasem)

sebagai wahana keamanan dan ketertiban bangsa serta seluruh lapisan masyarakat, yang dituangkan dalam 3 (tiga) pilar revolusi mental yaitu integritas, etos kerja dan gotong royong. Integritas harus dimaknai sebagai sebuah gerakan yang mengedepankan pada aspek kejujuran, dapat dipercaya, memiliki karakter positif dan bertanggung jawab.

Sedangkan etos kerja harus tercermin dari sikap masyarakat

yang kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tulus ikhlas dan tuntas. Sedangkan untuk gotong royong digambarkan sebagai sebuah aktivitas yang mengedepankan kerjasama, solidaritas antar sesama, berorientasi pada kepentingan orang banyak. Namun yang paling penting dari semua itu adalah, revolusi mental harus terinternalisasi di dalam jiwa masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. (ant)

DPRD Bali Serius Masalah Wisman Tiongkok



Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Bali Ketut Kariyasa Adnyana. (AntaraneWS Bali/Komang Suparta)

Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Bali Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan pihaknya serius menyikapi permasalahan wisatawan Tiongkok di Pulau Dewata, bahkan pihaknya sudah merinci masalah tersebut.

"Saya sudah merinci dalam menyikapi permasalahan

wisatawan Tiongkok tersebut. Kami telah membawa dan menyarankan point-point rekomendasi. Ini juga saya akan serahkan kepada Pak Ketua DPRD (Adi Wiryatama)," kata Kariyasa Adnyana pada pertemuan dengan pemangku kepentingan komponen pariwisata di Gedung DPRD Bali, Rabu.

Kariyasa Adnyana mengatakan penyebab rusak diawali adanya jaringan toko-toko milik orang Tiongkok. Aktivitas jaringan beberapa toko mensubsidi wisatawan murah ke Bali, sampai di Bali wisatawan dipaksa belanja di toko yang mensubsidi tersebut.

Kemudian yang terjadi, ada penipuan, pemaksaan, alias tindak kejahatan agar membeli barang-barang di toko

"mafia Tiongkok" yang membangun usaha di Bali.

"Keaslian barang itu diragukan. Disebutkan barang itu hasil Indonesia, seperti kasus latex, perhiasan mewah, batu mulia, hasil alam seperti sarang burung walet, obat-obatan herbal dan lainnya. Padahal rata-rata barang tersebut malah dari Tiongkok atau China," ucap politikus asal Bunsungbiu, Kabupaten Buleleng.

Sikap Kariyasa Adnyana untuk nanti dituangkan ke rekomendasi adalah mendesak agar seluruh toko-toko jaringan "mafia Tiongkok" di Bali ditertibkan atau ditutup. Yang jumlahnya sekitar 28 toko.

"Bagi kami untuk menertibkan 28 toko, dengan alamat jelas dan lengkap bukan pekerjaan sulit. Tutup, tertibkan dan usut siapa bermain.

Proses hukum jika ada pelanggaran pidana," ucap Kariyasa Adnyana yang juga politikus PDIP.

Sedangkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali Luh Wiratmi mengatakan bahwa fakta-faktanya memang banyak tenaga kerja asing Tiongkok bekerja di Bali. Bahkan kondisi ini sebenarnya menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal Bali, ketika malah orang Tiongkok jadi penjaga toko di Bali, mengambil pekerjaan serabutan.

"Ini jelas tidak ada izin, Bali tidak mungkin memberikan izin pegawai serabutan untuk orang asing atau Tiongkok. Ini membuat gerah Bali. Ini mengganggu proses pengentasan pengangguran kalau pekerjaan serabutan diambil oleh China," katanya. (ant)